

ANALISIS REALISASI ANGGARAN UNTUK MENILAI EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI KINERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN ANGGARAN 2014-2017

Ade Khusnul Khotimah

Program Studi D3 Akuntansi

STIE Putra Bangsa Kebumen

Adekhusnul99@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja pemerintah daerah Kabupaten Kebumen tahun anggaran 2014-2017. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kebumen yang berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA) periode tahun anggaran 2014-2017. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan menggunakan teknis analisis efektivitas dan efisiensi untuk menilai kinerja pemerintah daerah Kabupaten Kebumen. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, tingkat efektivitas realisasi anggaran kinerja pemerintah daerah Kabupaten Kebumen tahun anggaran 2014-2017 dapat dikatakan sangat efektif, yaitu dengan memiliki tingkat presentase efektivitas rata-rata diatas 100%, sedangkan tingkat efisiensi realisasi anggaran kinerja pemerintah daerah di Kabupaten Kebumen tahun anggaran 2014 dapat dikatakan kurang efisien, kemudian tahun anggaran 2015-2017 dapat dikatakan cukup efisien dalam mengelola anggaran keuangan daerahnya dengan menunjukkan adanya penurunan tingkat efisiensi yang mengindikasikan telah dilakukan perbaikan kinerja oleh pemerintah daerah. Meskipun demikian, semakin besar nilai efisiensi yang mendekati angka 100% atau lebih dari 100% menunjukkan tingkat efisiensi yang kurang baik dengan indikasi adanya kecenderungan pemborosan anggaran.

Kata Kunci: Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen, Anggaran, Efektivitas, Efisiensi.

ABSTRACT

This research aimed to analyze local government performance of Kebumen in fiscal year 2014-2017. The data that used in this research was secondary data that would gert from Departement's Financial Management local government of Kebumen in form of Budget Realization Report in fiscal year 2014-2017. This research is descriptive study using analytical techniques to asses effectiveness and efficiency of local government performance of Kebumen. The result of this research showed that, the level of effectiveness of the budget realization of local government performance of Kebumen fiscal year 2014-2017 can be said to be very effective , is to have an average percentage of effectiveness above 100%, while the level of efficiency of budget realization of local government performance of Kebumen in fiscal year 2014 can be said to be less efficiency, then 2015-2017 can be quite efficiency in managing the financial budget with the region showed a descrease in level of efficiency indicated that performance improvement have been made by the local government. Nevertheless, greater the value of efficiency approaching 100% or more than 100% indicates poor efficiency levels with an indication of tendency budget waste.

Keyword: Local government performance of Kebumen, Budget, Effectiveness, Efficiency.

ANALISIS REALISASI ANGGARAN UNTUK MENILAI EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI KINERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN ANGGARAN 2014-2017

PENDAHULUAN

Mewujudkan *good governance* diperlukan perubahan paradigma pemerintah yang mendasar dari sistem lama yang serba sentralis, dimana pemerintah pusat sangat kuat dalam menentukan kebijakan. Paradigma baru tersebut menuntut suatu sistem yang mampu mengurangi ketergantungan dan bahkan menghilangkan ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, serta bisa memberdayakan daerah agar mampu berkompetisi baik secara regional, nasional maupun internasional. Menanggapi paradigma tersebut, pemerintah otonomi kepada daerah seluas-luasnya yang bertujuan untuk memungkinkan daerah mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri agar berdaya guna dan berhasil guna dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan serta dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Tuntutan baru muncul agar organisasi sektor publik memperhatikan *value for money* dalam menjalankan aktivitasnya. Tujuan yang dikehendaki masyarakat mencakup pertanggung jawaban mengenai *value for money*, yaitu ekonomis dalam pengadaan dan alokasi sumber daya, efisiensi (berdaya guna) dalam penggunaan sumber daya dalam artian penggunaan diminimalkan dan hasilnya dimaksimalkan, serta efektif dalam artian mencapai tujuan dan sasaran (Sumenge, 2013).

Diberlakukannya UU No. 32 tahun 2004 yang kemudian lebih dikenal dengan sebutan otonomi daerah yang diganti dengan UU No. 23 tahun 2014, kemudian disempurnakan dengan UU No. 9 tahun 2015 serta untuk dana perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah dikeluarkan juga UU No. 33 tahun 2004. Kedua UU ini erat kaitannya karena secara otomatis dengan adanya peralihan wewenang dari pemerintah pusat ke daerah harus diikuti dengan penyerahan keuangan yang dipercayakan pemerintah pusat untuk bisa mengolah keuangan di masing-masing daerah. Dalam UU No. 33 tahun 2004 menyatakan bahwa untuk mendukung penyelenggaraan otonomi daerah melalui penyediaan sumber-sumber pembiayaan berdasarkan desentralisasi, dekonsentrasi, tugas pembantuan, dan instansi vertikal perlu diatur perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah berupa sistem keuangan yang diatur berdasarkan pembagian wewenang, tugas dan tanggung jawab yang jelas antar tingkat pemerintahan (Dien *et al.*, 2015).

Organisasi sektor publik saat ini tengah menghadapi tekanan untuk efisien dalam memperhitungkan biaya ekonomi dan biaya sosial serta dampak negatif atas aktivitas yang dilakukan. Setiap organisasi pemerintahan pasti menginginkan tujuannya tercapai secara efektif dan efisien dalam merealisasikan anggaran pendapatan dan belanja daerahnya, terlebih lagi dalam situasi globalisasi seperti sekarang ini, untuk itu pemerintah harus menyusun laporan realisasi anggaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Laporan realisasi anggaran merupakan salah satu komponen dalam laporan keuangan pemerintah yang menyajikan informasi tentang realisasi anggaran dalam suatu periode tertentu. Laporan realisasi anggaran bagian yang sangat penting dalam suatu perusahaan atau instansi, dimana fungsinya untuk mengetahui keadaan keuangan suatu perusahaan atau instansi. Laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah yang telah ditetapkan melalui PERDA setelah sebelumnya diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) paling lambat 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir, laporan realisasi anggaran ini merupakan salah satu alat ukur untuk melihat implementasi dan kebijakan pelaksanaan pengelolaan keuangan suatu daerah dalam upaya mewujudkan pelayanan publik yang optimal serta upaya dalam mendorong pembangunan ekonomi daerah (Rukayah *et al.*, 2017).

Pada penelitian ini penulis menggunakan penelitian terdahulu sebagai referensi untuk mempermudah proses dalam melakukan penelitian. Penelitian terdahulu yang digunakan sebagai referensi dalam penelitian ini antara lain:

Waney *et al.*, (2018) hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada tahun 2012-2016 tingkat efektivitas anggaran belanja pertanian dan peternakan Provinsi Sulawesi Utara mengalami peningkatan yang efektif. Tingkat atau kriteria efisiensi Dinas Pertanian dan Pertanian Provinsi Sulawesi Utara pada tahun 2012-2016, secara keseluruhan sudah di olah dengan baik dan memiliki kriteria yang sangat efisien. Pelaksanaan anggaran 2012-2016 dikategorikan sebagai sangat efisien karena tingkat efisiensi semua berada dibawah 60%.

Rukayah *et al.*, (2017) hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata rasio efektivitas dari tahun 2014-2016 adalah 102% yang berarti sangat efektif. Ini karena realisasi pendapatan retribusi daerah telah meningkat dari tahun ke tahun. Rasio dari efisiensi Badan Perijinan Terpadu Penanaman Modal Kabupaten Serang menunjukkan bahwa rata-ratanya adalah 92% artinya kurang efisien. Hal ini karena belanja operasional dan belanja modal meningkat setiap tahun.

Tabel 1
Data Anggaran dan Realisasi Pendapatan-LRA
Tahun 2014-2017

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)
2014	1.875.551.127.000	1.967.047.779.137
2015	2.285.405.734.000	2.326.188.256.641
2016	2.779.114.760.000	2.606.209.824.034
2017	2.739.317.507.000	2.713.113.397.677

Sumber: BPKAD Kabupaten Kebumen

Berdasarkan tabel diatas, terlihat bahwa ada kenaikan disetiap tahunnya pada pendapatan-LRA. Kenaikan ini dikarenakan pendapatan pajak daerah yang terus meningkat, namun kenaikan pendapatan pajak daerah tidak diikuti dengan retribusi daerah.

ANALISIS REALISASI ANGGARAN UNTUK MENILAI EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI KINERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN ANGGARAN 2014-2017

Dilihat dari laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Kebumen pada tahun 2016-2017, realisasi pendapatan retribusi daerah lebih rendah daripada anggaran pendapatan retribusi daerahnya. Pada tahun 2016, ini disebabkan karena penyerapan anggaran untuk kesehatan di Kabupaten Kebumen hanya terserap 87,62%. Padahal pagu anggaran pada tahun lalu untuk urusan wajib ini dialokasikan mencapai Rp 322,01 miliar lebih. Sedangkan realisasinya sebesar Rp 282,02miliar lebih. Pagu anggaran kesehatan sebesar Rp 322,01 miliar lebih itu diperuntukkan untuk Dinas Kesehatan, RSUD dr. Soedirman dan Bagian Kesra Setda Kebumen. (www.kebumenekspress.com)

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul “ANALISIS REALISASI ANGGARAN UNTUK MENILAI EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI KINERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN ANGGARAN 2014-2017”.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Tingkat Efektivitas Realisasi Anggaran Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2014-2017?
2. Bagaimana Tingkat Efisiensi Realisasi Anggaran Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2014-2017?

Batasan Masalah

Sesuai dengan kebutuhan penulis, batasan masalah pada penelitian ini adalah Laporan Realisasi Anggaran pada Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2014-2017.

Tujuan Masalah

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Mengetahui Tingkat Efektivitas Realisasi Anggaran Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2014-2017.
2. Mengetahui Tingkat Efisiensi Realisasi Anggaran Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2014-2017.

TINJAUAN PUSTAKA

Anggaran

Menurut Arif *et al.*, (2009:123) “Anggaran adalah satu rencana kegiatan yang diukur dalam satuan uang yang berisi perkiraan belanja dalam satu periode tertentu dan sumber yang diusulkan untuk membiayai belanja tersebut.”

Anggaran Sektor Publik

Menurut Waney *et al.*, (2018) Anggaran sektor publik adalah perencanaan finansial tentang perkiraan pengeluaran dan penerimaan yang

diharapkan akan terjadi di masa mendatang dengan melihat data yang diperoleh dari masa lalu sebagai acuan penetapan anggaran.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan oleh Peraturan Daerah.

Kinerja Pemerintah Daerah

Menurut Fahmi (2015:2) “Kinerja adalah hasil yang diperoleh oleh suatu organisasi baik organisasi tersebut bersifat *profit oriented* dan *non profit oriented* yang dihasilkan selama satu periode waktu.”

Tujuan pengukuran kinerja menurut Mahmudi (2010:14) adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tingkat ketercapaian tujuan organisasi.
2. Menyediakan suatu pembelajaran pegawai.
3. Memperbaiki kinerja periode berikutnya.
4. Memberikan pertimbangan yang sistematis dalam pembuatan keputusan pemberian *reward* dan *punishment*.
5. Memotivasi pegawai.
6. Menciptakan akuntabilitas publik.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja

Menurut Mahmudi (2007:20) Kinerja merupakan suatu konstruk multidimensional yang mencakup banyak faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja adalah:

1. Faktor personal/individual
2. Faktor kepemimpinan
3. Faktor tim
4. Faktor sistem
5. Faktor kontekstual (situasional)

Laporan Realisasi Anggaran

Rukayah *et al.*, (2017) Laporan Realisasi Anggaran (LRA) adalah laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian sumber dana ekonomi yang dikelola pemerintah pusat/daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan.

Manfaat informasi realisasi anggaran yaitu menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan, realisasi belanja, realisasi transfer, surplus/defisit dan realisasi pembiayaan dari satu entitas pelaporan masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya. Informasi tersebut berguna bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber-sumber daya ekonomi, akuntabilitas, dan ketaatan entitas pelaporan terhadap anggaran dengan:

1. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi.

ANALISIS REALISASI ANGGARAN UNTUK MENILAI EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI KINERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN ANGGARAN 2014-2017

2. Menyediakan informasi mengenai realisasi anggaran secara menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran.

Struktur dan Isi Laporan Realisasi Anggaran

Menurut Tanjung (2009:83) dalam PSAP 02 paragraf 9 menjelaskan bahwa dalam Laporan Realisasi Anggaran harus diidentifikasi secara jelas, dan diulang pada setiap halaman laporan, jika dianggap perlu, informasi berikut:

1. Nama entitas pelaporan atau sarana identifikasi lainnya;
2. Cakupan entitas pelaporan;
3. Periode yang dicakupkan;
4. Mata uang pelaporan;
5. Satuan angka yang digunakan.

Selanjutnya dalam PSAP 02 Paragraf 14 dijelaskan bahwa Laporan Realisasi Anggaran sekurang-kurangnya mencakup pos-pos sebagai berikut:

1. Pendapatan
2. Belanja
3. Transfer
4. Surplus dan defisit
5. Penerimaan pembiayaan
6. Pengeluaran pembiayaan
7. Pembiayaan neto
8. Sisa lebih kurang pembiayaan anggaran (SiLPA/SiKPA)

Selanjutnya dalam paragraf 15 dijelaskan bahwa pos, judul dan sub jumlah lainnya disajikan dalam Laporan Realisasin Anggaran apabila diwajibkan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah ini, atau apabila penyajian tersebut diperlukan untuk menyajikan Laporan Realisasi Anggaran secara wajar.

Efektivitas

Menurut Mahmudi (2005:92) “Efektivitas merupakan hubungan antara *output* dengan tujuan, semakin besar kontribusi (sumbangan) *output* terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan.” Efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan dan sasaran yang harus dicapai. Kegiatan operasional dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan (*spending wisely*).

Efektivitas dalam pemerintah daerah dapat diartikan penyelesaian kegiatan tepat waktu dan dalam batasan anggaran yang tersedia, dapat berarti pula mencapai tujuan dan sasaran seperti yang telah direncanakan. Efektivitas berarti tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan.

Efisiensi

Menurut Mahmudi (2011:22) efisiensi terkait dengan hubungan antara *output* berupa barang atau

pelayanan yang dihasilkan dengan sumber daya yang digunakan untuk menghasilkan *output* tersebut. Suatu organisasi, program, atau kegiatan dikatakan efisien apabila mampu menghasilkan *output* tertentu dengan *input* serendah-rendahnya, atau dengan *input* tertentu mampu menghasilkan *output* sebesar-besarnya.

Rasio efisiensi belanja ini digunakan untuk mengukur tingkat penghematan anggaran yang dilakukan pemerintah. Pemerintah daerah dinilai telah melakukan efisiensi anggaran jika rasio efisiensinya kurang dari 100%, sebaliknya apabila melebihi 100%, maka mengindikasikan telah terjadi pemborosan anggaran.

Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh Waney *et al.*, (2018) dengan judul “Analisis Realisasi Anggaran untuk Menilai Efektivitas dan Efisiensi Kineja Pemerintah di Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Sulawesi Utara”. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan anggaran belanja di Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Sulawesi Utara memiliki kriteria efektivitas yang bervariasi dari tahun ke tahun, dari yang cukup efektif sampai mengalami peningkatan yang efektif. Pada tahun 2012 tingkat efektivitasnya adalah 89,93%, tahun 2013 tingkat efektivitasnya 94,61%, tahun 2014 tingkat efektivitasnya 93,78%, tahun 2015 tahun efektivitasnya 90,57%, dan tahun 2016 tingkat efektivitasnya 94,98%. Jadi secara keseluruhan dari tahun 2012-2016 tingkat efektivitas anggaran belanja Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Sulawesi Utara mengalami peningkatan yang baik. Tingkat atau kriteria efisiensi Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Sulawesi Utara tahun 2012-2016, secara keseluruhan sudah diolah dengan baik, dimana pada tahun 2012 tingkat efisiensi 40,19%, tahun 2013 tingkat efisiensi 56,53%, tahun 2014 tingkat efisiensi 45,51%, tahun 2015 tingkat efisiensi 40,78%, dan tahun 2016 tingkat efisiensi 57,70%. Jadi anggaran belanja pada Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Sulawesi Utara sudah memiliki kriteria yang sangat efisien, karena tingkat efisiensi semua berada dibawah 60%. Pengelolaan anggaran belanja ini sudah berhasil memenuhi syarat efisiensi yaitu penggunaan dana yang minimum untuk mencapai hasil yang maksimal.

Penelitian yang dilakukan oleh Dien *et al.*, (2015) dengan judul “Analisis Laporan Realisasi Anggaran untuk Menilai Kinerja Keuangan pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Bitung”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja keuangan Dinas Pendapatan Kota Bitung dianalisis dari LRA tahun anggaran 2009-2013. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat dan kriteria efektivitas penerimaan pendapatan asli daerah di Dinas Pendapatan Kota Bitung tahun anggaran 2009-2013 sangat efektif dari tahun ke tahun. Dilihat dari hasil perhitungan rasio efektivitas menunjukkan bahwa Dinas Pendapatan Kota Bitung

ANALISIS REALISASI ANGGARAN UNTUK MENILAI EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI KINERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN ANGGARAN 2014-2017

mampu memobilisasi penerimaan pendapatan asli daerah sesuai dengan yang ditargetkan dengan tingkat efektivitasnya diatas 100%. Tingkat dan kriteria efisiensi anggaran belanja Dinas Pendapatan Kota Bitung tahun anggaran 2009-2013 secara keseluruhan kurang efisien dari tahun ke tahun. Dilihat dari hasil perhitungan rasio efisiensi menunjukkan bahwa Dinas Pendapatan Kota Bitung kurang mengefisienkan penggunaan anggaran belanja sesuai yang ditargetkan dengan tingkat efisiensi yang hampir mendekati 100%.

METODE

Objek Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kebumen, yang bertempat di Jalan Pahlawan No. 138 Bumirejo, Kebumen.

Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi. Metode dokumentasi yaitu pengumpulan data dengan cara pengumpulan secara sistematis atas dokumen-dokumen yang berkaitan dengan topik masalah yang diambil dalam penelitian. Sistem pengumpulan data dengan metode ini adalah dokumen-dokumen yang ada di instansi.

Sumber Pengumpulan Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari catatan dan dokumen-dokumen yang berada di kantor, buku-buku kepustakaan, literatur dan sumber lain.

Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu data kuantitatif. Data kuantitatif adalah data yang dapat diukur dalam suatu skala numerik atau angka-angka. Data tersebut dapat diperoleh dari data keuangan serta laporan-laporan lain yang disajikan.

Metode Analisis Data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif kuantitatif yaitu dengan cara mengumpulkan data, disusun, diinterpretasikan dan analisis sehingga memberikan kesimpulan yang jelas dan objektif terhadap masalah yang ada yaitu mengenai kinerja pemerintah daerah Kabupaten Kebumen dengan melihat dari segi efektivitas dan efisiensi laporan realisasi anggaran.

1. Menghitung efektivitas laporan realisasi anggaran Kabupaten Kebumen selama tahun 2014-2017

Efektivitas adalah tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan. Tingkat efektivitas dapat diukur dengan cara membandingkan realisasi dengan target anggaran penerimaan dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas} : \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Anggaran Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Sumber : Mahmudi (2016:141)

Setelah melakukan analisis efektivitas, adapun cara untuk mengetahui kriteria efektivitasnya yaitu sebagai berikut:

Tabel 3

Kriteria Efektivitas

Sangat efektif	>100%
Efektif	100%
Cukup efektif	90%-99%
Kurang efektif	75%-89%
Tidak efektif	<75%

Sumber: Mahmudi (2016:141)

2. Menghitung efisiensi laporan realisasi anggaran Kabupaten Kebumen selama tahun 2014-2017

Setelah melakukan efektivitas, penulis menganalisis tingkat efisiensinya diukur dengan cara membandingkan realisasi belanja dengan anggaran belanja. Adapun cara untuk mengetahui tingkat efisiensi yaitu sebagai berikut:

$$\text{Efisiensi} : \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

Sumber: Mahmudi (2016:164)

Rumus efisiensi pada Mahmudi (2016:164) sama dengan rumus efisiensi pada Mahsun (2013) dalam Rukayah *et al.*, (2017:5).

$$\text{Efisiensi} : \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

Sumber: Mahsun (2013) dalam Rukayah *et al.*, (2017:5)

Setelah melakukan analisis dengan menggunakan rumus, adapun cara untuk mengukur kriteria efisiensi yaitu sebagai berikut:

Tabel 4

Kriteria Efisiensi

Tidak efisien	>100%
Kurang efisien	90%-100%
Cukup efisien	80%-89,99%
Efisien	60%-79,99%
Sangat efisien	<60%

Sumber: Mahsun (2013) dalam Rukayah *et al.*, (2017:6)

Adapun tahapan-tahapan penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Melakukan survey langsung ke objek penelitian yaitu BPKAD Kabupaten Kebumen.
2. Mengajukan permohonan terkait perizinan penelitian.
3. Mengumpulkan data dan informasi mengenai laporan realisasi anggaran.
4. Menghitung laporan realisasi anggaran dengan menggunakan rasio efektivitas dan efisiensi.

$$\text{Efektivitas} : \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Anggaran Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

$$\text{Efisiensi} : \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

5. Memberikan kesimpulan dan saran sehingga dapat menjadi masukan bagi BPKAD Kabupaten Kebumen.

ANALISIS REALISASI ANGGARAN UNTUK MENILAI EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI KINERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN ANGGARAN 2014-2017

HASIL DAN PEMBAHASAN

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kebumen

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) beralamat di Jalan Pahlawan No. 138 Desa Bumirejo, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen. BPKAD merupakan salah satu dari satuan kerja perangkat daerah dalam lingkungan pemerintah Kabupaten Kebumen.

Efektivitas

Tabel 5
Data Anggaran dan Realisasi Penerimaan PAD Tahun 2014-2017

Tahun	Realisasi Penerimaan PAD (Rp)	Anggaran Penerimaan PAD (Rp)
2014	242.079.502.075,00	163.586.346.000,00
2015	245.159.255.421,00	221.657.039.000,00
2016	291.016.321.703,00	273.228.579.000,00
2017	443.608.862.461,00	437.343.224.000,00

Sumber: BPKAD Kabupaten Kebumen

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Anggaran Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Tabel 6
Hasil Perhitungan Efektivitas Tahun 2014-2017

Tahun	Realisasi Penerimaan PAD (Rp)	Anggaran Penerimaan PAD (Rp)	%	Kriteria
2014	242.079.502.075,00	163.586.346.000,00	147,98 %	Sangat efektif
2015	245.159.255.421,00	221.657.039.000,00	110,60 %	Sangat efektif
2016	291.016.321.703,00	273.228.579.000,00	106,51 %	Sangat efektif
2017	443.608.862.461,00	437.343.224.000,00	101,43 %	Sangat efektif

Sumber: data diolah

Berdasarkan tabel diatas, terlihat bahwa Kabupaten Kebumen pada tahun 2014-2017 memiliki tingkat efektivitas di atas 100%. Hasil ini menunjukkan bahwa dalam mengelola anggaran daerah Kabupaten Kebumen sangat efektif, yaitu tepat pada apa yang telah menjadi target anggaran. Dilihat dari tahun 2014 tingkat efektivitas sebesar 147,98% dengan kriteria sangat efektif, tahun 2015 mengalami penurunan sebesar 37,38% sehingga tingkat efektivitas menjadi 110,60% dengan kriteria sangat efektif, tahun 2016 mengalami penurunan sebesar 4,09% sehingga tingkat efektivitas menjadi 106,51% dengan kriteria sangat

efektif, dan tahun 2017 mengalami penurunan sebesar 5,08% sehingga tingkat efektivitas menjadi 101,43% dengan kriteria sangat efektif.

Meskipun tingkat efektivitas dari tahun 2014-2017 mengalami penurunan, nilai presentase efektivitas di Kabupaten Kebumen selama 5 tahun periode anggaran sangat efektif, yaitu dengan hasil presentase keseluruhan nilai efektivitas yang menunjukkan nilai diatas 100%. Kabupaten Kebumen berhasil meningkatkan realisasi PAD, yang mengindikasikan bahwa Kabupaten Kebumen sudah dikatakan mampu mengelola daerahnya untuk meningkatkan sumber PAD nya, yang secara tidak langsung kegiatan perekonomian daerah tersebut juga akan meningkat.

Efisiensi

Tabel 7
Data Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun 2014-2017

Tahun	Realisasi Belanja (Rp)	Anggaran Belanja (Rp)
2014	1.906.501.957.288,38	2.050.427.145.000,00
2015	2.033.106.110.204,68	2.264.039.012.000,00
2016	2.283.531.796.631,00	2.614.927.866.000,00
2017	2.113.132.464.285,34	2.360.199.300.000,00

Sumber: BPKAD Kabupaten Kebumen

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

Tabel 8
Hasil Perhitungan Efisiensi Tahun 2014-2017

Tahun	Realisasi Belanja (Rp)	Anggaran Belanja (Rp)	%	Kriteria
2014	1.906.501.957.288,38	2.050.427.145.000,00	92,98 %	Kurang efisien
2015	2.033.106.110.204,68	2.264.039.012.000,00	89,80 %	Cukup efisien
2016	2.283.531.796.631,00	2.614.927.866.000,00	87,33 %	Cukup efisien
2017	2.113.132.464.285,34	2.360.199.300.000,00	89,53 %	Cukup efisien

Sumber: data diolah

Berdasarkan tabel IV.4, terlihat bahwa Kabupaten Kebumen pada tahun 2014 memiliki tingkat efisiensi sebesar 92,98%. Menurut kriteria efisiensi yang telah ditetapkan, semakin besar nilai efisiensi yang mendekati angka 100%, maka menunjukkan tingkat efisiensi yang kurang efisien. Hasil ini ditunjukkan oleh Realisasi Belanja sebesar Rp 1.906.501.957.288,38 dan Anggaran Belanja sebesar Rp 2.050.427.145.000,00. Selisih Anggaran Belanja dengan Realisasi Belanja sebesar Rp 143.925.187.711,62, yang berarti pada tahun 2014 pemerintah daerah kurang melakukan penghematan anggarannya. Hasil perhitungan efisiensi tahun 2015, Realisasi Belanja sebesar Rp 2.033.106.110.204,68 dan Anggaran Belanja sebesar Rp 2.264.039.012.000,00. Selisih Anggaran Belanja dengan Realisasi Belanja sebesar Rp 230.932.901.795,32.

ANALISIS REALISASI ANGGARAN UNTUK MENILAI EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI KINERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN ANGGARAN 2014-2017

Hasil perhitungan efisiensi tahun 2016, Realisasi Belanja sebesar Rp 2.283.531.796.631,00 dan Anggaran Belanja sebesar Rp 2.614.927.866.000,00. Selisih Anggaran Belanja dengan Realisasi Belanja sebesar Rp 331.396.069.369. Tahun 2015-2016 Kabupaten Kebumen mengalami penurunan tingkat presentase efisiensi, hasil ini menunjukkan bahwa kinerja pemerintah daerah semakin baik, artinya pemerintah daerah melakukan penghematan anggaran. Kemudian pada tahun 2017 terjadi peningkatan efisiensi sebesar 2,2% dari tahun sebelumnya, dengan hasil perhitungan efisiensi tahun 2017, Realisasi Belanja sebesar Rp 2.113.132.464.285,34 dan Anggaran Belanja sebesar Rp 2.360.199.300.000,00. Selisih Anggaran Belanja dan Realisasi Belanja sebesar Rp 247.066.835.714,66.

Berdasarkan hasil diatas, menunjukkan bahwa pada tahun 2014 memiliki kriteria kurang efisien, kemudian pada tahun 2015-2017 memiliki kriteria cukup efisien. Hal ini berarti pemerintah daerah berhasil dalam mengelola anggaran keuangan daerahnya, dengan menunjukkan bahwa pemerintah daerah Kabupaten Kebumen terus berusaha memperbaiki kinerjanya.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, maka kesimpulannya adalah sebagai berikut:

1. Tingkat efektivitas realisasi anggaran kinerja pemerintah daerah Kabupaten Kebumen tahun anggaran 2014-2017 dapat dikatakan sangat efektif, yaitu dengan memiliki tingkat presentase efektivitas rata-rata diatas 100%. Hal ini berarti pemerintah daerah berhasil merealisasikan pendapatan dan anggaran pendapatannya. Meskipun tingkat presentase efektivitasnya dari tahun ke tahun menurun, tetapi tetap dapat mempertahankan kriteria tingkat efektivitasnya berada pada kriteria sangat efektif.
2. Tingkat efisiensi realisasi anggaran kinerja pemerintah daerah Kabupaten Kebumen pada tahun 2014 memiliki kriteria kurang efisien, kemudian pada tahun 2015-2017 memiliki kriteria cukup efisien, dengan memiliki tingkat presentase efisiensi rata-rata 80%-89,99%. Hal ini berarti pemerintah daerah berhasil dalam mengelola anggaran keuangan daerahnya, dengan menunjukkan bahwa pemerintah daerah Kabupaten Kebumen terus berusaha memperbaiki kinerjanya.

Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, penulis memberikan saran dengan maksud dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak terkait. Adapun saran yang diberikan oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah daerah Kabupaten Kebumen sebaiknya tetap meningkatkan dan mengoptimalkan pendapatan daerahnya dengan memaksimalkan

hasil pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah.

2. Pemerintah daerah Kabupaten Kebumen sebaiknya lebih mengoptimalkan semua sumber daya yang ada untuk memperbaiki pengelolaan dalam penggunaan anggaran belanja agar lebih ditingkatkan efisiensinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Arif, B., Muchlis dan Iskandar. 2009. *Akuntansi Pemerintahan*. Cetakan Pertama. Akademia. Jakarta.
- Bastian, I. 2010. *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Jakarta. Erlangga.
- . 2014. *Akuntansi Sektor Publik di Indonesia*. BPFE. Yogyakarta.
- Dien, A.N.J., J. Tinangon dan S. Walandaouw. 2015. Analisis Laporan Realisasi Anggaran untuk Menilai Kinerja Keuangan pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Bitung. *Jurnal EMBA* 3(1): 534:541.
- Fahmi, I. 2015. *Manajemen Kinerja Teori dan Aplikasi*. Bandung. Alfabeta.
- Julita. 2011. Analisis Efektivitas dan Efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja pada Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Dosen Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*.
- Mahmudi. 2005. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. UPP AMP YKPN. Yogyakarta.
- . 2007. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Cetakan Kedua (Revisi). UPP STIM YKPN. Yogyakarta.
- . 2010. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. UPP STIM YKPN. Yogyakarta.
- . 2011. *Akuntansi Sektor Publik*. Cetakan Pertama. UII Press. Yogyakarta.
- . 2016. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah*. UPP STIM YKPN. Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Andi. Yogyakarta.
- Munandar, M. 2001. *Budgeting, Perencanaan Kerja, Pengkoordinasian Kerja, Pengawasan Kerja*. Edisi Ketiga. BPFE. Yogyakarta.

ANALISIS REALISASI ANGGARAN UNTUK MENILAI EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI KINERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN ANGGARAN 2014-2017

- Muryanti, K. 2017. Analisis Realisasi Anggaran untuk Menilai Efektivitas dan Efisiensi Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2011-2015. *Skripsi*. Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta. Surakarta.
- Nafarin, M. 2000. *Penganggaran Perusahaan*. Edisi Pertama. Salemba Empat. Jakarta.
- Nordiawan, D. dan A. Hertianti. 2010. *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi Kedua. Salemba Empat. Jakarta.
- Nordiawan, D., I.S. Putra, dan M. Rahmawati. 2012. *Akuntansi Pemerintahan*. Salemba Empat. Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang *Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- . Nomor 71 Tahun 2010 Tentang *Standar Akuntansi Pemerintah*.
- Rukayah, N. Kusumawati, dan R.I. Afriani. 2017. Analisis Laporan Realisasi Anggaran dengan Menggunakan Rasio Efektivitas dan Rasio Efisiensi pada Kantor Badan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Serang. *Jurnal Akuntansi* 4(2).
- Sumenge, A.S. 2013. Analisis Efektivitas dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Minahasa Selatan. *Jurnal EMBA1*(3): 74-81.
- Tanjung, A.H. 2009. *Akuntansi Pemerintahan Daerah Konsep dan Aplikasi Sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan*. Cetakan Ketiga. Alfabeta. Bandung.
- Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang *Pemerintah Daerah*.
- Waney, C.K., D.P.E. Saerang dan S.W. Alexander. 2018. Analisis Realisasi Anggaran untuk Menilai Efektivitas dan Efisiensi Kinerja Pemerintah di Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concert* 13(2): 334-341.
- <https://www.kebumenekspress.com/2017/04/serapan-anggaran-kesehatan-kebumen-2016.html?m=1> diakses pada 2 November 2018 Pukul 15:12 WIB.